

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KENEGARAWANAN**DALAM PEMAJUAN KEPEMIMPINAN NASIONAL****Aries Sudiarso ¹, dan Husein Tuasikal ²**Email: aries.st@yahoo.co.id ¹ .Titisani2014@gmail.com²

Administrasi Bisnis, Politeknik LP3I Jakarta

ABSTRACT

This research aims to review the implementation of national leadership in statesmanship leadership indonesian president to run for the leadership of their ir. Was up to the leadership of president dr .S.B yudhoyono , especially in statesmanship of leadership in the national leadership. Of statesmanship leadership to operated who found the concept of regeneration leadership, education and training of legal certainty and the leadership and government institutions. Of the three leadership conception statesmanship leaderships do attempt to implementation national leadership to the furtherance of which made statesmanship leadership must be able to follow any change of progress in the field of national leadership .Shall be a national of leadership needs to be answered by the leader of the country. When this was conducted then happen to the steady improvement of national leadership and able to answered all the global dynamic.

Keywords : Statesmanship Leadership and National leadership

PENDAHULUAN

Arus Globalisasi telah mempengaruhi pranata dunia khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, Cina maupun Rusia sangat mempengaruhi negara-negara yang sedang berkembang dalam tingkat penyesuaian Kepemimpinan Nasional dan kemampuan SDM, sehingga kepemimpinan di masing-masing negara dituntut untuk masuk pada suatu sistem kesepakatan regional atau global yang dikehendaki oleh negara-negara besar dan maju tersebut. Pengaruh globalisasi yang memaksakan kehendak perubahan yang berkaitan dengan demokrasi, HAM, lingkungan hidup maupun Kepemimpinan Nasional yang berakibat pada perubahan yang lebih cepat dari perubahan dan penyesuaian yang dicanangkan pemerintah.

Bagi Indonesia dampak globalisasi membawa perubahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala permasalahannya. Kemajuan teknologi, transportasi dan *tourisme* (3T), menyebabkan seolah negara menjadi tanpa batas (*borderless state*) dan budaya luar sangat mudah masuk untuk mempengaruhi budaya bangsa Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi tantangan global tetapi masih terhambat oleh kelompok yang memiliki kepentingan. Sebagai contoh kebijakan pemerintah untuk menangani kasus Bank Century menuai pro dan kontra yang berkepanjangan, penanganan kasus korupsi yang dianggap masih tebang pilih, munculnya kasus mafia hukum melibatkan para penegak hukum sampai dengan penahanan terhadap Komjen Pol Susno Duaji, pemilihan kepala daerah yang hampir selalu berakhir dengan kerusuhan, penanganan lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai serta penanganan persoalan konflik social seperti tingginya fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) di masyarakat yang semua fenomena tersebut membawa dampak sosial yang cukup besar serta berpengaruh kepada kebijakan pemerintah.

Perubahan terjadi begitu cepat dan dahsyat, sangat mempengaruhi kondisi Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman persoalan menuju dunia teknologi informasi yang sangat membutuhkan kualitas kepemimpinan kenegarawanan yang handal. Untuk dapat menjawab tantangan menuju tercapainya cita-cita dan tujuan nasional Indonesia maka diperlukan pemimpin yang berwawasan strategis dan berpikiran global, mampu mengikuti perkembangan dan mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional. Kehadiran pemimpin negarawan menjadi penting untuk menjawab kepentingan negaranya tanpa sedikitpun kehilangan jati diri, kepribadian dan wawasan kebangsaannya di era pengembangan Kepemimpinan Nasional.

Penanaman kembali nilai-nilai kebangsaan pada era global saat ini, merupakan bagian terpenting dari aktualisasi kepemimpinan kenegarawanan dan harus dipandang sebagai suatu upaya yang sungguh-sungguh bagi bangsa Indonesia yang siap menghadapi benturan global yang sangat keras dan tidak menentu. Untuk itulah, perlu dipikirkan kembali kesiapan untuk menghadapi kemajuan Kepemimpinan Nasional dalam kepemimpinan kenegarawanan agar dapat menjawab tantangan masa depan.

Dalam buku Kepemimpinan terbitan (Lemhanas RI, 2010) Pada hakekatnya karakter seorang negarawan adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk segera tanggap dan cepat menyikapi perubahan lingkungan strategis nasional, regional dan global karena pengaruh teknologi informatika, transportasi dan komunikasi dan disertai dengan tekad yang kuat untuk menjadi pemimpin yang profesional, yang pada dasarnya mencakup

perpaduan IQ. EQ da SQ . Menurut Prof Dr Muladi,SH, bagi Indonesia sendiri disamping karakteristik tersebut maka pemimpin negarawan adalah yang benar-benar mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan negarawan memiliki nilai monumental dan pengakuan dunia, sehingga untuk menyiapkan kepemimpinan tersebut perlu kaderisasi melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan negarawan yang diterapkan secara formal maupun informal serta memiliki pemikiran yang komprehensif integral sesuai profesinya (supra struktur, infra struktur dan sub struktur) serta kewenangan untuk mengarahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kepemimpinan kenegarawanan senantiasa harus mampu mengikuti setiap perubahan termasuk kemajuan dalam bidang Kepemimpinan Nasional. Pemajuan Kepemimpinan Nasional mutlak menjadi suatu kebutuhan yang harus dijawab oleh pemimpin bangsa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa pemajuan Kepemimpinan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap pemimpin nasional di Indonesia ini, karena belum semua pemimpin nasional memahami perkembangan dan pemajuan Kepemimpinan Nasional. Menurut Prof Dr Muladi,SH bahwa kepemimpinan kenegarawanan standarnya adalah pengakuan nasional dan internasional .Mencermati persoalan tersebut maka diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki karakter kenegarawanan agar mampu menjalankan perannya dalam pemajuan kepemimpinan Nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Pancasila sebagai Landasan Idiil. Sebagai dasar negara, pandangan dan falsafah hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai dan norma yang diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikemukakan (Chandra, 2018). Pancasila akan menuntun kenegarawanan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran karena keyakinan kepada Tuhan YME (Sila I), Pancasila memastikan pemimpin negarawan memiliki kepekaan dan kemanusiaan (Sila II), Pancasila memberi koridor negarawan dengan rasa persatuan (Sila III), Pancasila mengembangkan watak/karakter negarawan dengan sifat demokratis (Sila IV) dan melengkapi sifat negarawan dengan prinsip keadilan sosial (Sila V). Maka upaya aktualisasi kepemimpinan kenegarawanan tidak bisa dilepaskan dari sistem politik nasional yang berlandaskan Pancasila. Agar aktualisasi kepemimpinan kenegarawanan diupayakan tetap berada dalam kerangka membangun

manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan landasan idiil Pancasila akan mewarnai karakter seorang pemimpin kenegarawanan.

UUD NRI 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Pembukaan UUD NRI 1945 memperkokoh ikatan negarawan dengan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia. Menurut Tanireja, T.P. dan Afandi, M. (2015) dalam konteks ini, terutama jika belajar dari krisis nasional, dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum dapat menopang upaya menciptakan stabilitas politik nasional yang mantap. Meskipun demikian, fokus realitas yang terdapat dalam UUD NRI 1945 sesungguhnya mempunyai relevansi dengan upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pasal 28c ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Fakta ini semestinya mendorong kepemimpinan negarawan untuk menjadikan cerminan sebagai rujukan dalam pembuatan perundang-undangan beserta peraturan-peraturan lainnya guna menjamin terciptanya manusia Indonesia seutuhnya. Dari landasan konstitusional inilah diharapkan munculnya tertib hukum dan aturan sebagai ukuran keberhasilan dari kepemimpinan kenegarawanan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional. Dalam perjalanan menuju kehidupan yang akomodatif dan transformatif itu, kini bangsa Indonesia berada pada masa transisi yang penuh dengan tantangan yang signifikan. Pada satu sisi, tekad dan upaya kearah terciptanya suasana politik yang demokratis terus dituju, disisi lain permasalahan heterogen yang rentan terhadap upaya terciptanya manusia Indonesia seutuhnya selalu dihadapang permasalahan. Secara visional, fenomena tersebut memerlukan kepemimpinan negarawan yang visioner, yaitu memiliki pemikiran jauh ke depan, agar dapat melewati masa transisi dalam situasi yang kurang menentu, menuju masa konsolidasi dan akhirnya menuju pematangan jati diri bangsa. Menurut Ranadirekha (2009) Cara pandang dan sikap inilah yang disebut sebagai Wawasan Nusantara, yaitu sebuah cara pandang dan sikap yang memberikan legitimasi serta toleransi setinggi-tingginya, menghormati dan mengakui semua bentuk Kebhinekaan dalam kehidupan bernegara, ke arah visi kenegarawanan yang memiliki wawasan guna mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Pemimpin negarawan yang memiliki visi Wawasann Nusantara akan menjunjung tinggi kebhinekaan, tidak lagi mengenal istilah putera daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional / RPJPN Tahun 2005-2025. Dalam perencanaan BKP Disebutkan pada Bab II Kondisi

Umum huruf C Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 1 Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan Kepemimpinan Nasional mengalami peningkatan Berbagai hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat internasional. Hal itu mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah, dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangan dan pasal 2 Walaupun demikian, kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan Kepemimpinan Nasional dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal itu ditunjukkan, antara lain, oleh masih rendahnya sumbangan Kepemimpinan Nasional di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya Kepemimpinan Nasional di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya Kepemimpinan Nasional. Dengan demikian siapapun pemimpin nasional harus memiliki karakter negarawan agar mampu mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini merupakan dasar peraturan khususnya guna menguraikan unsur kedua yaitu pengembangan Kepemimpinan Nasional. Penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Kepemimpinan Nasional menjadi sangat penting untuk mengembangkan mekanisme ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara.

UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, menentukan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut dapat mendorong terbentuknya kepemimpinan negarawan.

Teori Kepemimpinan menurut Richard L Daft, S. (2015)

1. *Great Man Theory*, menurut Van Wagner: seseorang menjadi pemimpin semata-mata karena memang ia dilahirkan sebagai pemimpin. Jadi *leader is not made but is born*, teori ini menggambarkan pemimpin sebagai insan yang heroik dan magis.
2. *Trait Theory*, sebaliknya teori ini memusatkan pada karakteristik pribadi seorang pemimpin, meliputi: bakat-bakat pembawaan, ciri-ciri pemimpin, faktor fisik, kepribadian,

kecerdasan dan ketrampilan berkomunikasi . Dari teori ini sangat jelas tentang karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin.

3. *Change Leadership*, yang dapat melakukan sinergi positif antara *Enthusiasm* (kegairahan), Energy and Hope, optimism, pantang menyerah dalam mengejar tujuan, disertai rasa percaya diri. Dalam *Culture of Change* seorang pemimpin akan selalu mengalami atau menikmati ketegangan yang merupakan kesatuan dalam beratnya memecahkan masalah.
4. *Global Leadership*, yang konsepnya dilandasi oleh keyakinan, bahwa didalam lingkungan kehidupan sosial yang kompleks dan bersifat global, Tidak ada model khusus (single model) yang cocok terhadap situasi yang sangat luas yang dihadapi seorang pemimpin apapun juga. Dalam hal ini paling tidak terdapat tiga karakteristik yang muncul (*Emerging Characteristics*) dalam kerangka kepemimpinan global yang bercirikan *Developing technological savvy* (pengembangan kecerdasan teknologi ini, masa depan kemitraan dan jaringan global yang terpadu tidak mungkin terjadi), *Building partnership and alliances* (kepemimpinan yang kolaboratif, seorang pemimpin yang berhasil di masa depan akan bergerak secara terintegrasi).

Kepemimpinan Negarawan menurut (Drs Djafar Assegaf, 2012) adalah seseorang yang mempunyai sifat kepemimpinan yang ahli dalam mengelola negara, serta menjalankan politiknya dengan pandangan jauh kedepan serta sudah tidak mementingkan lagi kelompoknya tetapi sudah mementingkan negara dan bangsanya

Kepemimpinan Presiden RI ke I Bapak Ir. Soekarno. Tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 yang kemudian dijuluki sebagai Proklamator. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan gagasan tentang Dasar Ideologi Negara yang disebutnya Pancasila. Dalam sidang PPKI, 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, The Founding Father. Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Wafat pada hari Minggu 21 Juni 1970 sebagai Pahlawan Proklamasi, selama kepemimpinannya banyak menunjukkan karakter kenegarawanan yang diwariskan kepada generasi penerus bangsa (Lesmana. 2008)

Kepemimpinan Presiden RI ke II Bapak Soeharto. Jenderal Besar H.M. Soeharto pernah menjadi Pengawal Panglima Besar Sudirman, pernah menjadi Panglima Mandala (Pembebasan Irian Barat). Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno paska

pemberontakan G-30-S/PKI dan pada tanggal 11 Maret 1966 Jenderal Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Pada sidang Istimewa MPRS tahun 1967 menunjuk Pak Harto sebagai Pejabat Presiden, dikukuhkan selaku Presiden RI II Maret 1968. Pak Harto memerintah lebih dari tiga dasa warsa lewat enam kali Pemilu, sampai ia mengundurkan diri, 21 Mei 1998. Pak Harto meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2008 pada usia 87 tahun, dijuluki Bapak Pembangunan, selama memimpin beliau terus mengangkat nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, sebagai azas setiap kepartaian melalui Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai modal dasar kepemimpinan negarawan (Lesmana. 2008)

Kepemimpinan Presiden RI III bapak Prof B J Habibie, Ing. Habibie penuh kontroversi, 10 tahun kuliah di Jerman hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat *Summa Cum laude*. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB Gmbh Jerman, sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis. Disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto pada Mei 1998. Akibat kesalahan opsi yang ditawarkan Habibie maka pada bulan Oktober 1999 Pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR RI, kepemimpinannya penuh kontroversi tetapi berhasil memajukan Kepemimpinan Nasional (Lesmana 2008).

Kepemimpinan Presiden RI IV bapak KH Abd Wahid. Selama dua tahun menjabat Presiden harus diakui, bahwa ada tiga karya besar beliau yang mampu dilakukan Demiliterisasi, Depolitisasi dan Debirokratisasi sehingga militer lebih humanis, kebebasan multi Partai dan birokrasi menjadi lebih fleksibel. Gus Dur mengangkat kedaulatan di tangan rakyat, pemerintah sangat menghargai pribadi-pribadi warga negara yang menjunjung tinggi martabat dan menghormati budaya etnis Cina serta kehormatan kepemimpinan negara (Lesmana 2008).

Kepemimpinan Presiden RI V ibu Megawati Soekarno Putri. Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarnoputri, mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Ketua umum Partai politik berlambang banteng gemuk dan bermulut putih itu berhasil memenangkan Pemilu 1999 dengan meraih lebih tiga puluh persen suara. Tetapi ternyata pada SU MPR RI Oktober 1999, Mega hanya terpilih sebagai Wakil Presiden RI. Kurang dari dua tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR RI secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI V menggantikan KH Abd Wahid. Megawati SP memiliki kelebihan-kelebihan dalam memimpin diantaranya nilai kelembutan dan

ketabahan sehingga suasana menjadi lebih kondusif dan terus memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk dapat bangkit kembali (Lesmana 2008).

Kepemimpinan Presiden RI VI DR. S.B Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono berbeda dengan presiden sebelumnya, merupakan Presiden RI pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden RI pada 20 September 2004 dan terpilih kembali sebagai Presiden RI untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan dilantik pada tanggal 21 September 2009 untuk periode 2009-2014 untuk kedua kalinya. Meraih predikat lulusan terbaik Akabri Darat 1973 dengan menerima penghargaan Pedang Adhi Makayasa dan karier di militer terakhir sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI tahun 1999 dengan pangkat Letnan Jendral. Langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, pensiun lebih dini dari militer saat menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abd Wahid. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, beliau memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politiknya dan pada tanggal 20 Oktober 2004 dilantik menjadi Presiden RI VI, taat beragama dan berwawasan luas di dunia Internasional serta memperhatikan peningkatan kualitas SDM (anggaran pendidikan naik menjadi 20 % dari APBN), peduli terhadap pemajuan Kepemimpinan Nasional. SBY terus berjuang memberantas KKN dan menciptakan kondisi yang lebih demokratis dan terus melanjutkan agenda Reformasi (Lesman 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berdasarkan konsep teori dan tinjauan literatur berlandaskan paradigma nasional dalam merumuskan aktualisasi kepemimpinan dan penelitian sosial yang terkait sebelumnya dari Kholifah, dan Wayan Suyadya, (2018 deskriptif kualitatif Data,)

Teknik Analisis Data Penelitian menggunakan PESO (Perspektif, Edukatif, Sistimatis dan Obyektif) analisa terhadap permasalahan agar mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan melalui pendekatan secara komperhensif integral nasional dalam merumuskan aktualisasi kepemimpinan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyikapi globalisasi, Indonesia sulit membendung penetrasi budaya luar yang sering bertentangan dengan nilai budaya atau jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah terasa dan patut dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh, dalam arti memiliki karakter kenegarawanan yang kuat, kecakapan yang handal guna mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional. Kondisi aktualisasi kepemimpinan negarawan saat ini ditinjau dari kaderisasi kepemimpinan nasional, pelatihan dan pendidikan kepemimpinan nasional, kepastian hukum, kerjasama antar lembaga pemerintahan, visioner kepemimpinan dan tinjauan terhadap pengelolaan Negara.

Analisis Kondisi Kepemimpinan Kenegarawanan dalam kepemimpinan Nasional.

1. Kaderisasi Kepemimpinan Negarawan. Pimpinan yang terlahir melalui sumber rekrutmen pemimpin lembaga pemerintahan mulai menggunakan mekanisme *fit and proper test* meskipun belum sempurna, mekanisme tersebut merupakan wujud dari upaya untuk melahirkan pemimpin yang memiliki karakter negarawan. *Fit and proper test* tidak lagi mempertimbangkan putera daerah, melainkan lebih mengutamakan kapasitas dan kapabilitas. Pemimpin dipilih berdasarkan kinerja dan rekam jeaknya. Seperti disampaikan Silberman, M. (2014) pemimpin mendapatkan dukungan dari organisasi dan pengikutnya apabila terpilih dan diseleksi secara obyektif.

Kenyataan yang tidak dapat dielakkan akibat dinamika reformasi nasional, semua merasa pantas menjadi pemimpin dengan arogansi sektoral. Kenyataan ini tidak dapat dicegah, semua berjalan begitu saja, semua tercengang ketika melihat kualitas yang ditampilkan anggota legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD) baik pusat maupun daerah, sebagian masih jauh dari harapan rakyat yang terwakili. Fenomena dalam tata kehidupan masyarakat diatas menunjukkan bahwa saat ini secara nasional Indonesia belum memiliki sistem kaderisasi kepemimpinan negarawan yang baik. Kader-kader kepemimpinan negarawan yang disiapkan secara sistematis, melalui proses bertahap, berjenjang dan berlanjut. Akibat adanya ekses-ekses negatif dari sistem pemerintahan masa lalu yang bersifat otoritarian, generasi muda kehilangan orientasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika negara mengalami krisis yang berkepanjangan, semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat khususnya generasi muda sebagai kader pemimpin bangsa, tidak lagi dapat ditemukan pemuda yang memiliki kualitas kepemimpinan bermasyarakat maupun kualitas kepemimpinan bernegara yang menjadi harapan bangsa. Di era teknologi demikian pesatnya pengembangan Kepemimpinan Nasional dan begitu besarnya minat

generasi muda untuk menguasai Kepemimpinan Nasional, apabila tidak terarah dengan baik maka lebih besar pemanfaatannya untuk kegiatan bersifat negative.

Persoalan pada lambatnya pengkaderan pemimpin negarawan yang memiliki karakter jiwa kebangsaan dan patriotisme. Pemahaman para Pemimpin Negarawan terhadap Wawasan Kebangsaan semakin meluntur sehingga semakin jauh kesadarannya untuk mengimplementasikannya. Kondisi inilah yang mengakibatkan para Pemimpin Bangsa jauh dari sifat kenegarawan yang didukung dengan moral dan etika kepemimpinan nasional. Hal ini menyebabkan semakin mudarnya kredibilitas dan integritas kepemimpinan negarawan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Negarawan. Pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada alinea IV pembukaan UUD NRI 1945, pemerintah telah meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan dilaksanakan secara berjenjang mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Materi yang diajarkan secara nasional harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun dari tahun ke tahun standar pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah selalu berubah, sehingga keluar dari proses pendidikan dan tidak memiliki standar yang tetap. Inilah kondisi yang ada, seakan-akan dalam pengkajian dan perumusan standar pendidikan nasional tidak dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Pembinaan kecerdasan masyarakat baru diarahkan pada optimalisasi kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosional (EQ), yang implementasinya dituangkan dalam kebijakan proses seleksi dan atau penerimaan pegawai negeri, karyawan perusahaan, anggota organisasi kemasyarakatan yaitu keharusan untuk melaksanakan test IQ, test akademik, test kesehatan jasmani melalui test kesampataan dan test kejiwaan melalui test psikologi serta wawancara pengalaman pribadi bagi para peserta seleksi. Disini terlihat belum diterapkan aspek kecerdasan spiritual (SQ) dalam penentuan standar seleksi dan penerimaan. Kepemimpinan Negarawan adalah pemimpin yang memiliki karakter dan mampu menggabungkan antara bakat kepemimpinan dengan pengetahuan dan keahlian .

Seorang negarawan adalah orang-orang yang dapat menghadapi persoalan kenegaraan dan politik, disamping menerapkan prinsip kepemimpinan yang profesional ternyata juga menunjukkan kepribadian atau karakter pribadi yang luhur dan positif yang sangat menonjol, bermanfaat bagi kemanusiaan dan masyarakat baik nasional maupun

internasional, berbagai karakter tersebut adalah: berbudi luhur, bijaksana, teguh hati, perasaan keadilan, memiliki prediksi pemikiran jauh kedepan, memiliki karya monumental yang relatif langgeng dan bersifat universal, cinta damai, anti kekerasan, toleran dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ulet, bermartabat, berjiwa besar, diakui dan dihormati oleh masyarakat, nasional dan internasional, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, berani, non-partisan dalam memperjuangkan kepentingan umum. Saat ini ada kecenderungan sulit untuk menemukan pemimpin nasional yang memiliki ciri kenegarawanan.

3. Kepastian hukum dan hubungan kelembagaan pemerintah. Dinamika *Law Enforcement* secara nasional belum dilaksanakan dengan baik dan terpadu, masih ada praktek diskriminatif terhadap sebagian masyarakat terutama mereka-mereka yang memiliki wawasan hukum, peraturan dan perundang-undangan sangat rendah. Kecenderungan ini terlihat dari berbagai kondisi yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat baik di tingkat kota besar maupun di pedesaan. Sebagian masyarakat berasumsi seakan-akan hukum dan aparat penegak hukum dapat dibeli dengan uang serta belum optimalnya integrasi dan kerjasama yang jelas dan komprehensif antar instansi penegak hukum. Dalam penyelenggaraan negara secara nasional mulai dari tingkat pusat sampai dengan pedesaan seharusnya hubungan kerja antar lembaga pemerintah lebih sinergis dan saling memberikan masukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Permasalahan yang muncul dari tata kehidupan masyarakat sesuai dengan klasifikasinya, seharusnya saling dikomunikasikan, dikolaborasikan dan dikoordinasikan secara terpadu oleh seluruh kelembagaan dalam birokrasi yang fleksibel. Keputusan strategis yang dihasilkan berupa kebijakan pemerintah betul-betul dapat dijadikan dasar penanganan masalah-masalah yang muncul dalam dinamika kehidupan nasional secara adil dan konsekuen.

Dilaksanakannya Pemilu pada harapannya menghasilkan pemimpin yang jujur, transparan berintegritas, berbudi luhur dan bermartabat. Pemilu secara langsung diharapkan menjadi alat rekrutmen pemimpin nasional di tingkat daerah dengan standar yang jelas oleh rakyatnya. Beberapa fakta menunjukkan sebaliknya, justru banyak yang terlibat kasus-kasus korupsi untuk kepentingan pribadi, diantaranya Gubernur Sumut menjadi tersangka oleh KPK karena penyalahgunaan dana APBD, Gubernur Bengkulu korupsi penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB tahun 2008, Bupati Sleman divonis 4 tahun penjara karena korupsi dana pengadaan buku ajar, Bupati Kutai Kertanegara divonis 6 tahun penjara akibat korupsi dana studi kelayakan pembangunan

bandara, Walikota Manado divonis 5 tahun penjara akibat korupsi dana APBD dan masih banyak fakta lainnya.

Analisis Konseptual Kepemimpinan Kenegarawanan dalam pemajuan kepemimpinan Nasional.

1. Kaderisasi Kepemimpinan Negarawan. Sistem pembinaan kepemimpinan nasional yang memiliki karakter negarawan diutamakan adalah penyiapan kader-kader bangsa yang berkualitas. Generasi muda adalah benih utama yang disiapkan untuk mendukung suksesi kepemimpinan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara formal dan informal. Terselenggaranya komunikasi sosial antara generasi tua dengan generasi muda melalui forum-forum diskusi maupun seminar dalam rangka pewarisan nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepemimpinan nasional serta wawasan kebangsaan secara rutin, terprogram dan berkesinambungan dan berlanjut. Diharapkan generasi muda dapat mengetahui, mengerti dan memahami nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Terselenggaranya pembinaan generasi muda melalui program beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal tentang kenegaraan dan penyelenggaraan negara, baik program dalam negeri maupun program luar negeri. Diperlukan pemberian penghargaan negara terhadap tokoh generasi muda yang berprestasi dalam kepedulian terhadap aspek-aspek kenegaraan, melalui penilaian dan seleksi ketat yang sangat obyektif. Hal tersebut diperlukan wadah pembinaan generasi muda yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya untuk mendapatkan pembinaan ketrampilan berorganisasi dan bermasyarakat.

Kepemimpinan Nasional diharapkan dapat menggabungkan antara bakat kepemimpinan dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuan. Faktor keturunan hanyalah merupakan faktor pendukung awal atau faktor prakondisi, karena faktor tersebut merupakan faktor kemudahan bagi mereka yang memang sudah memiliki garis keturunan yang dicirikan pada bakat kejujuran, integritas dan rasa percaya diri. Kejujuran dan rasa percaya diri adalah dua faktor yang banyak mendorong sehingga memiliki jiwa terbuka, jujur dan memiliki keberanian untuk mengadakan perubahan. Kepemimpinan Nasional yang berintegritas bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa membentuk rasa persatuan dan kesatuan yang saling menghormati dan menghargai akan adanya perbedaan agama, suku bangsa, sosial

budaya, etnis dan adat istiadat yang menjadi ciri khas kemajemukan bangsa Indonesia. Berbicara kepemimpinan tidak mungkin mengabaikan pemahaman tentang kenegarawanan, sikap kenegarawanan merupakan karunia Tuhan YME, karena seorang negarawan pasti bermanfaat bagi masyarakat. Seorang negarawan adalah orang-orang yang dapat menghadapi persoalan kenegaraan dan politik, disamping menerapkan prinsip kepemimpinan yang profesional ternyata juga menunjukkan kepribadian atau karakter pribadi yang luhur dan positif yang sangat menonjol, bermanfaat bagi kemanusiaan dan masyarakat baik nasional maupun internasional, berbagai karakter tersebut adalah; berbudi luhur, bijaksana, teguh hati, perasaan keadilan, memiliki prediksi pemikiran jauh kedepan, memiliki karya monumental yang relative langgeng dan bersifat universal, cinta damai, anti kekerasan, toleran dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ulet, bermartabat, berjiwa besar, diakui dan dihormati oleh masyarakat, nasional dan internasional, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, berani, non-partisan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

2. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Negarawan. Menurut Silberman, M.(2014) pelatihan dan pendidikan dipandang sebagai sarana menuju kesadaran dan pengetahuan dan ketrampilan yang tujuannya adalah perubahan. Pendidikan formal merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar pendidikan harus betul-betul dijadikan acuan untuk terlaksananya proses pendidikan yang berorientasi pada budaya dan karakter bangsa tanpa mengabaikan konsep-konsep modern yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Diformulasikannya standar pendidikan nasional yang lebih komprehensif mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam merumuskan konsep tersebut harus melalui pengkajian yang mendalam dan menasional. Diharapkan standar pendidikan nasional ini tidak berubah tiap tahun tapi paling tidak lima tahun sekali ditinjau kembali dan disempurnakan menjadi lebih baik dan diprogramkannya pembinaan kepemimpinan nasional bagi para murid dan mahasiswa secara proporsional, bertingkat, berlanjut dan berkesinambungan. Diharapkan lembaga pendidikan negeri tidak hanya mengajarkan ilmu eksak tapi juga dibarengi dengan kegiatan pembinaan kepemimpinan nasional bagi para murid melalui kegiatan yang lebih berbobot untuk membentuk kader pemimpin yang benar-benar memahami sifat-sifat kepemimpinan nasional yang berpadangan jauh kedepan serta memiliki jiwa kenegarawan yang utuh dan tangguh. Sifat-sifat kepemimpinan nasional yang memiliki ketahanan mental yang kuat dan kemampuan yang tangguh dalam menghadapi permasalahan nasional dan global, dengan

ciri Moralitas, Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Visioner, Kerjasama, Kepedulian dan Berkeadilan. Diharapkan terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kecerdasan pemimpin nasional dengan mensinergikan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) secara nasional mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Landasan teori yang dapat digunakan bahwa: Seseorang yang sudah matang dalam bermasyarakat biasanya mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai moral. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat pribadi perorangan, tetapi juga memberikan kekuatan dari dalam dan keseimbangan dalam waktu krisis. Terbinanya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan beserta pengamalannya secara hakekat baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan kenegaraan. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan kepemimpinan nasional yaitu kepemimpinan yang terbangun dari sebuah kontrak tanggung jawab (*contract of accountability*) antara pemimpin dengan rakyatnya, karena ia dipilih oleh rakyat. Rakyat ingin memberikan amanah kepada pemimpin yang dipilihnya dengan sejumlah agenda yang harus dilakukan dalam proses kepemimpinannya.

3. Kepastian Hukum dan hubungan kelembagaan pemerintah. Hukum dan perundang-undangan merupakan perangkat penting untuk pembentukan karakter bangsa, pengarah dan pedoman dalam mewujudkan ketertiban seluruh aspek kehidupan. Demikian juga halnya dengan pembentukan karakter kepemimpinan nasional yang taat hukum. Kepastian dan penegakan hukum diharapkan mampu menciptakan dampak penangkalan terhadap pelanggaran hukum dan penyelewengan kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Dilaksanakannya peninjauan, pengkajian dan perumusan kembali perangkat hukum dan perundang-undangan nasional secara menyeluruh tidak sebagian-sebagian, agar jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dapat mendorong semangat pengabdian generasi muda dan para pejabat negara menjadi lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan penegakan hukum secara nasional dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, terpadu dan tanpa pandang bulu, kalau memang bersalah secara formal maka harus diberikan sanksi hukum yang setimpal. Selanjutnya terwujudnya interaksi secara utuh dan berjenjang lembaga peradilan dalam menangani kasus penyimpangan penyelenggaraan administrasi negara serta pelanggaran hukum dan perundang-undangan penyelenggaraan negara serta konsisten dan konsekuen dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Sistem manajemen nasional merupakan sistem manajemen proses pengambilan keputusan nasional dalam mewujudkan ketahanan nasional seluruh aspek kehidupan nasional, sudah dirancang secara terpadu, profesional dan proporsional. Hubungan antar kelembagaan baik supra struktur, infra struktur hingga sub struktur telah diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan terjalin suatu bentuk kerjasama yang baik dan terintegrasi. Namun kenyataan di lapangan kondisi antar kelembagaan dipisahkan oleh ruang, waktu dan jarak. Kendala ini harus dapat diatasi dengan membangun semangat kebersamaan antar kelembagaan secara teratur, berjenjang dan disesuaikan dengan porsi kewenangan masing-masing. Terwujudnya integrasi nasional antar kelembagaan melalui penyelenggaraan musyawarah nasional untuk membahas dan mengkoordinasikan secara musyawarah dan kemufakatan permasalahan yang menjadi tanggung jawab lintas kelembagaan serta terwujudnya jaringan komunikasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Analisis Implementasi Kepemimpinan Kenejarawanan dalam pemajuan kepemimpinan Nasional.

Tolok ukur keberhasilan Kepemimpinan Kenejarawanan (menurut Dr Susilo Bambang Yudhoyono). Sebagai bangsa merdeka mengandung arti tidak hanya bebas dari belenggu penjajahan bangsa lain, namun juga bebas dari tekanan, dominasi dan penguasaan bangsa asing baik dalam artian ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan. Tercapainya kemandirian yang kini tengah menjadi salah satu paradigma Pembangunan Nasional di percaturan global. Cita-cita tersebut karena tidak mengenal dimensi waktu, dapat digunakan sebagai pembanding atau pengukur keberhasilan Kepemimpinan Kenejarawanan, baik di masa lalu, dimasa kini maupun di masa yang akan datang.

Menurut Hill, Charles W.L. and G.R. Jones. (1995) masalah kenegaraan penyelesaian dalam keputusan strategik. Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi diharapkan kepemimpinan nasional mampu mengaktualisasikan dirinya dalam proses pengambilan keputusan nasional yang sangat strategis di berbagai sektor dengan mengedepankan rasa nasionalisme, kebijakan pemanfaatan aspek-aspek asta gatra, profesionalisme, hukum dan pengaruh lingkungan. Idealisme untuk menyiapkan kualitas kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan dan memiliki karakter positif yang kuat, dibutuhkan pemikiran yang komprehensif integral agar dapat diaktualisasikan melalui proses yang dinamis, sederhana, efektif dan efisien. Kepemimpinan negarawan harus mampu membawa bangsa dan negara

keluar dari krisis menuju kearah kehidupan yang lebih sejahtera, demokratis dan eksis dalam kehidupan global berorientasi kepada aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Kualitas kepemimpinan nasional pada tingkat supra struktur, infra struktur dan sub struktur diharapkan secara konsisten dan konsekuen mampu mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional dalam rangka ketahanan nasional.

1. Kaderisasi Kepemimpinan Negarawan. Sistem pembinaan kepemimpinan nasional yang memiliki karakter negarawan diutamakan adalah penyiapan kader-kader bangsa yang berkualitas. Generasi muda adalah benih utama yang disiapkan untuk mendukung suksesi kepemimpinan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan secara formal dan informal. Terselenggaranya komunikasi sosial antara generasi tua dengan generasi muda melalui forum-forum diskusi maupun seminar dalam rangka pewarisan nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepemimpinan nasional serta wawasan kebangsaan secara rutin, terprogram dan berkesinambungan dan berlanjut. Diharapkan generasi muda dapat mengetahui, mengerti dan memahami nilai-nilai luhur bangsa dan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Terselenggaranya pembinaan generasi muda melalui program bea siswa untuk mengikuti pendidikan formal tentang kenegaraan dan penyelenggaraan negara, baik program dalam negeri maupun program luar negeri. Diperlukan pemberian penghargaan negara terhadap tokoh generasi muda yang berprestasi dalam kepedulian terhadap aspek-aspek kenegaraan, melalui penilaian dan seleksi ketat yang sangat obyektif. Hal tersebut diperlukan wadah pembinaan generasi muda yang putus sekolah akibat keterbatasan biaya untuk mendapatkan pembinaan ketrampilan berorganisasi dan bermasyarakat.

Kepemimpinan Nasional diharapkan dapat menggabungkan antara bakat kepemimpinan dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuan. Faktor keturunan hanyalah merupakan faktor pendukung awal atau faktor prakondisi, karena faktor tersebut merupakan faktor kemudahan bagi mereka yang memang sudah memiliki garis keturunan yang dicirikan pada bakat kejujuran, integritas dan rasa percaya diri. Kejujuran dan rasa percaya diri adalah dua faktor yang banyak mendorong sehingga memiliki jiwa terbuka, jujur dan memiliki keberanian untuk mengadakan perubahan. Kepemimpinan Nasional yang berintegritas bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa membentuk rasa persatuan dan kesatuan yang saling menghormati dan menghargai akan adanya perbedaan agama, suku bangsa, sosial

budaya, etnis dan adat istiadat yang menjadi ciri khas kemajemukan bangsa Indonesia. Berbicara kepemimpinan tidak mungkin mengabaikan pemahaman tentang kenegarawanan, sikap kenegarawanan merupakan karunia Tuhan YME, karena seorang negarawan pasti bermanfaat bagi masyarakat. Seorang negarawan adalah orang-orang yang dapat menghadapi persoalan kenegaraan dan politik, disamping menerapkan prinsip kepemimpinan yang profesional ternyata juga menunjukkan kepribadian atau karakter pribadi yang luhur dan positif yang sangat menonjol, bermanfaat bagi kemanusiaan dan masyarakat baik nasional maupun internasional, berbagai karakter tersebut adalah; berbudi luhur, bijaksana, teguh hati, perasaan keadilan, memiliki prediksi pemikiran jauh kedepan, memiliki karya monumental yang relative langgeng dan bersifat universal, cinta damai, anti kekerasan, toleran dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ulet, bermartabat, berjiwa besar, diakui dan dihormati oleh masyarakat, nasional dan internasional, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, berani, non-partisan dalam memperjuangkan kepentingan umum.

Beberapa upaya mengimplementasikan kaderisasi dalam kepemimpinan negarawan seperti :(a) Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan negarawan. Untuk melanjutkan kelangsungan hidup bangsa maka diperlukan upaya kaderisasi kepemimpinan negarawan, (b) Revitalisasi karakter kepemimpinan negarawan berbasis indek kepemimpinan nasional Indonesia (IKNI). Perlu adanya penajaman kembali tentang karakter pemimpin negarawan agar para pemimin nasional saat ini lebih megutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan partainya, dan (c) Mendorong perilaku kepeloporan dan keteladanan dari para pemimpin negarawan. Melalui perwujudan sikap strong leadership didalam menghadapi situasi yang tidak menentu dan krisis yang dihadapi ke depan, dibutuhkan seorang pemimpin yang berani dan menjadi anutan

2. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Negarawan. Pendidikan formal merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar pendidikan harus betul-betul dijadikan acuan untuk terlaksananya proses pendidikan yang berorientasi pada budaya dan karakter bangsa tanpa mengabaikan konsep-konsep modern yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Diformulasikannya standar pendidikan nasional yang lebih komprehensif mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam merumuskan konsep tersebut harus melalui pengkajian yang mendalam dan menasional. Diharapkan standar pendidikan nasional ini tidak berubah tiap tahun tapi paling tidak lima tahun sekali ditinjau kembali dan disempurnakan menjadi lebih baik dan diprogramkannya pembinaan

kepemimpinan nasional bagi para murid dan mahasiswa secara proporsional, bertingkat, berlanjut dan berkesinambungan. Diharapkan lembaga pendidikan negeri tidak hanya mengajarkan ilmu eksak tapi juga dibarengi dengan kegiatan pembinaan kepemimpinan nasional bagi para murid melalui kegiatan yang lebih berbobot untuk membentuk kader pemimpin yang benar-benar memahami sifat-sifat kepemimpinan nasional yang berpadangan jauh kedepan serta memiliki jiwa kenegarawan yang utuh dan tangguh. Sifat-sifat kepemimpinan nasional yang memiliki ketahanan mental yang kuat dan kemampuan yang tangguh dalam menghadapi permasalahan nasional dan global, dengan ciri Moralitas, Jujur, Disiplin, Tanggung Jawab, Visioner, Kerjasama, Kepedulian dan Berkeadilan. Diharapkan terselenggaranya pembinaan dan pengembangan kecerdasan pemimpin nasional dengan mensinergikan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) secara nasional mulai dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Landasan teori yang dapat digunakan bahwa: Seseorang yang sudah matang dalam bermasyarakat biasanya mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai moral. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat pribadi perorangan, tetapi juga memberikan kekuatan dari dalam dan keseimbangan dalam waktu krisis. Terbinanya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan beserta pengamalannya secara hakekat baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan kenegaraan. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan kepemimpinan nasional yaitu kepemimpinan yang terbangun dari sebuah kontrak tanggung jawab (*contract of accountability*) antara pemimpin dengan rakyatnya, karena ia dipilih oleh rakyat. Rakyat ingin memberikan amanah kepada pemimpin yang dipilihnya dengan sejumlah agenda yang harus dilakukan dalam proses kepemimpinannya.

Beberapa upaya mengimplementasikan pendidikan dan latihan dalam kepemimpinan negarawan seperti : (a) Departemen Pendidikan Nasional meningkatkan materi Pendidikan PKN untuk menumbuhkan rasa kebangsaan sehingga dapat menghasilkan dan mengembangkan kepemimpinan kenegarawanan yang Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi NKRI, memiliki wawasan kebangsaan dan pemikiran yang luas ke depan untuk kepentingan masa depan dan (b) Mendorong partai politik menjadi wadah pendidikan dan latihan kepemimpinan negarawan mulai dari anggotanya sampai dengan pengkaderan pimpinan partai politik sehingga akan dihasilkan kader pemimpin partai politik yang berkualitas dan penuh perhatian serta memiliki integritas yang tinggi sebagai negarawan.

3. Kepastian Hukum dan hubungan kelembagaan pemerintah. Hukum dan perundang-undangan merupakan perangkat penting untuk pembentukan karakter bangsa, pengarah dan pedoman dalam mewujudkan ketertiban seluruh aspek kehidupan. Demikian juga halnya dengan pembentukan karakter kepemimpinan nasional yang taat hukum. Kepastian dan penegakan hukum diharapkan mampu menciptakan dampak penangkalan terhadap pelanggaran hukum dan penyelewengan kewenangan dalam penyelenggaraan negara. Dilaksanakannya peninjauan, pengkajian dan perumusan kembali perangkat hukum dan perundang-undangan nasional secara menyeluruh tidak sebagian-sebagian, agar jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara dapat mendorong semangat pengabdian generasi muda dan para pejabat negara menjadi lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan penegakan hukum secara nasional dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, terpadu dan tanpa pandang bulu, kalau memang bersalah secara formal maka harus diberikan sanksi hukum yang setimpal. Selanjutnya terwujudnya interaksi secara utuh dan berjenjang lembaga peradilan dalam menangani kasus penyimpangan penyelenggaraan administrasi negara serta pelanggaran hukum dan perundang-undangan penyelenggaraan negara serta konsisten dan konsekuen dalam memutuskan perkara yang sedang ditangani.

Sistem manajemen nasional merupakan sistem manajemen proses pengambilan keputusan nasional dalam mewujudkan ketahanan nasional seluruh aspek kehidupan nasional, sudah dirancang secara terpadu, profesional dan proporsional. Hubungan antar kelembagaan baik supra struktur, infra struktur hingga sub struktur telah diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga akan terjalin suatu bentuk kerjasama yang baik dan terintegrasi. Namun kenyataan di lapangan kondisi antar kelembagaan dipisahkan oleh ruang, waktu dan jarak. Kendala ini harus dapat diatasi dengan membangun semangat kebersamaan antar kelembagaan secara teratur, berjenjang dan disesuaikan dengan porsi kewenangan masing-masing. Terwujudnya integrasi nasional antar kelembagaan melalui penyelenggaraan musyawarah nasional untuk membahas dan mengkoordinasikan secara musyawarah dan kemufakatan permasalahan yang menjadi tanggung jawab lintas kelembagaan serta terwujudnya jaringan komunikasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi, mulai dari pusat sampai ke daerah.

Beberapa upaya kepemimpinan kenegarawan dalam rangka mengimplementasikan Kepastian Hukum dan hubungan kelembagaan pemerintah seperti : (a) Supra dan Infra Struktur menjaga dan menciptakan suatu konstitusi, hukum, sistem dan aturan serta tata

tertib yang efektif dan efisien dalam menegakkan hukum, sehingga para pemimpin terdorong untuk secara konsisten selalu taat kepada konstitusi menjadi pelopor dan suriteladan masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang benar dan bertindak cepat dan tepat serta memihak kepada kepentingan masyarakat, (b) Pemerintah menciptakan budaya malu bagi kalangan pimpinan dari mulai strata terendah sampai dengan strata tingkat nasional. Sebagai contoh bila pimpinan tersebut gagal dalam melaksanakan tugasnya seharusnya yang bersangkutan ikhlas atau legowo untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin, sehingga dapat dicontoh oleh yang lain untuk malu dan tidak akan mengulang perbuatan yang salah, dan (c) Pejabat Pemerintah dan seluruh tokoh nasional menjaga dan meningkatkan perilaku pemimpin yang berkepribadian, pemimpin tidak akan berhasil memimpin dirinya sendiri tanpa berjuang untuk kemudian sukses sebagai keberhasilan yang mereka sebut atas usaha diri mereka sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kepemimpinan kenegarawanan di Era globalisasi banyak menghadapi tantangan, khususnya yang berhubungan dengan penguasaan Kepemimpinan Nasional. Keutamaan kepemimpinan kenegarawanan mampu memberdayakan potensi diri, teman, handaitaulan maupun bawahan serta seluruh bangsa pada suatu tujuan yang mulia dalam pencapaian pengabdian bersama. Pemimpin negarawan adalah Pemimpin yang berkualitas yang meyakini bahwa kesuksesan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kejayaan suatu negara hanya terletak pada bangsa yang dinamis untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan, sehingga tidak tertinggal dan terbelakang bahkan tertindas.
2. Harus disadari sampai saat ini masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas dan dikhawatirkan jika Indonesia tidak mampu mengatasinya dengan baik, maka akan dapat mengarah pada melemahnya ketahanan nasional. Dengan demikian diperlukan aktualisasi kepemimpinan kenegarawanan guna mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional dalam rangka ketahanan nasional. Dipersiapkan secara serasi, selaras dan seimbang serta total terpadu, kuat, terarah dan berlanjut untuk mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kenegarawanan guna mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional dalam rangka ketahanan nasional. Diharapkan akan lahir pemimpin yang negarawan, yang mampu menghadapi dan menjawab setiap tantangan masa depan (*Change leadership and culture of change*), memiliki integritas, solidaritas

kebangsaan dan wawasan kebangsaan serta pemikiran global, komperhensif integral serta mampu mewujudkan pemajuan kepemimpinan nasional.

3. Kepemimpinan kenegarawanan ini sebaiknya tidak selalu bersifat birokratis dan terindoktrinasi serta dapat dilakukan dengan cara lebih memahami nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, moral dan spiritual bangsa secara komplementer dan kontekstual, tidak bersifat jargonistik dan mitos serta mengutamakan sifat yang melayani, mengayomi dan mengajak serta membimbing masyarakat, bangsa guna mewujudkan pemajuan Kepemimpinan Nasional dalam rangka ketahanan nasional.

Saran

Untuk mengimplementasikan kepemimpinan kenegarawanan secara konsepsi, maka perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Perlu menertibkan dan menegakkan mekanisme kerja serta mensinergikan fungsi kelembagaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif agar dapat melakukan tugas dan fungsinya sesuai porsi masing-masing, saling menghormati dan memuliakan serta saling menghargai perbedaan, tidak saling membuka aib seseorang agar tidak terjadi benturan kepentingan satu sama lain, oleh sebab itu kader-kader kepemimpinan harus ditempa dalam mekanisme dan aturan konstitusi serta hukum yang berlaku.
2. Perlu menyiapkan kader-kader pemimpin negarawan sedini mungkin melalui penyaringan kader yang selektif dan dididik pada suatu lembaga khusus yang bersifat unggulan dan mendapat pembekalan serta kesempatan yang menyeluruh berkaitan dengan kenusantaraan, kenegarawanan dan kebangsaan yang bersifat Nasional, Regional dan Internasional sehingga memberikan kemampuan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Perlu dilaksanakan akselerasi latihan kepemimpinan terhadap para pemimpin tingkat daerah sampai dengan pusat sebagai wujud pembentukan karakter kenegarawanan yang berwawasan Nusantara.
4. Perlu pengawasan secara ketat terhadap operasional anggaran pendidikan (20% dari APBN), sejalan dengan komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia unggulan secara khusus sebagai salah satu atau variabel pendukung atau kader kepemimpinan segenap aspek usaha dan kegiatan pembinaan demi mewujudkan generasi muda bangsa yang berkualitas, profesional dan mampu melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kenegarawanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich dan J.H. Donnelly, Jr. 1996. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. (Alih Bahasa : Nunuk Adiarni). Jilid 1. Edisi Kedelapan. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, M.S.P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hill, Charles W.L. and G.R. Jones. 1995. *Strategic Management Theory An Integrated Approach*. Third Edition. Houghton Mifflin Company. Boston. USA.
- Kholifah, dan Wayan Suyadya, I.2018. Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman dari Lapangan. Depok, Jakarta.
- Lesmana,2008. M.A, Dari Soekarno sampai SBY, Intrik dan Lobi Politik Para Penguasa,PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Monteiro, J. 2014. Lembaga – Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Ndraha, T. 2003. Budaya Organisasi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ranadireksa,2009. Visi Bernegara Arsitektur KonstitusiDemokratik. Fokus Media. Bandung.
- Richard L Daft, S. 2015. *The Leaderships Experience.USA*.
- Schermenton, R. 2010. *Introduction to Management. Danver USA..*
- Silberman, M. 2014. Experiential Learning, Strategi Pembelajaran Dunia Nyata , Jakarta
- Sudaryono. 2014. Leaderships. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta.
- Tanireja,T.P. dan Afandi, M. 2015. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila. Bandung.
- Umar, H. 2004. Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi (Edisi Revisi dan Perusahaan). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wijono, S. 2018. Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi. Jakarta.
- www.bpkp.go.id. 2005. Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (Pjp) Tahun 2005 – 2025. Diakses tanggal 28 Maret 2018.